

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kerja perekonomian dunia, dari sistem ekonomi yang berlandaskan industri menjadi sistem ekonomi yang berlandaskan digital. Peningkatan konektivitas menjadi fondasi penting dalam transformasi digital. Digitalisasi perdagangan memerlukan kerja sama dan partisipasi dari semua pihak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis digital (Darmastuti et al., 2025a). Digitalisasi memudahkan proses produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Ini dilakukan dengan menggunakan internet, kecerdasan buatan, komputasi awan, *big data*, serta berbagai *platform* digital lainnya (Darsana et al., 2023). Teknologi digital membantu memungkinkan berbagai proses ekonomi dan sosial transformasi yang berkembang pesat (Wibowo, 2025). Transformasi tersebut membuat ekonomi digital menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk bersaing di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Menurut Don Tapscott (1995) dalam bukunya *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang mengandalkan teknologi digital sebagai dasar utama dalam menciptakan nilai tambah secara ekonomi melalui pertukaran informasi dan

inovasi yang didasarkan pada jaringan digital (Khairunnisa et al., 2025). Ekonomi digital yang inklusif yang berarti tak seorang pun terabaikan (*no one left behind*) merupakan konsep ideal yang paling cocok untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Bachtiar et al., 2020). Perkembangan ekonomi digital secara global memaksa semua negara serta kelompok kerjasama, baik di tingkat regional maupun global, untuk bergerak cepat dalam meresponsnya, termasuk negara-negara anggota ASEAN. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, atau dikenal sebagai ASEAN, adalah organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui kesepakatan para negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, yang dipimpin oleh para elit politik pada masa itu. Tujuan utama pendirian ASEAN adalah untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kerja sama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Hafizon & Ramadhan, 2024).

Di wilayah Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi digital terus berkembang pesat karena semakin tingginya akses internet, penggunaan *platform* digital, serta berkembangnya perusahaan teknologi di berbagai bidang ekonomi. Potensi ekonomi digital di kawasan ASEAN diprediksi bisa mencapai lebih dari 2 triliun dollar AS pada tahun 2030, asalkan integrasi digital di wilayah tersebut berjalan dengan optimal (Farsha Alendro et al., 2026). Tentu saja, dalam merespons perkembangan ekonomi digital, negara-negara ASEAN menghadapi upaya untuk bertransformasi secara digital. Kerja sama ASEAN dalam mendorong ekonomi digital bisa dilihat melalui kerangka kerja sama secara regional.

Menurut Robert O. Keohane, kerja samanya berlangsung secara berkelanjutan melalui institusi yang mampu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi pencapaian tujuan bersama (Setyowati & Umam, 2026). Kerja sama regional dianggap sebagai bentuk kerja sama yang tidak hanya bertujuan untuk mengakses pasar global dan menarik investasi dari luar negeri, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan industri di daerah tersebut. Dari sudut pandang Hubungan Internasional, kerja sama ekonomi ASEAN bisa diartikan sebagai bentuk ketergantungan antar daerah yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama untuk menghadapi tantangan dari globalisasi. Karena tingkat akses internet yang semakin tinggi, jumlah pengguna ponsel cerdas (*smartphone*) yang terus meningkat, serta berkembangnya bisnis *e-commerce*, *fintech*, dan ekonomi berbasis *platform*, maka ASEAN menjadi salah satu wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi digital yang sangat besar di dunia.

Kerja sama ekonomi ASEAN adalah bagian penting yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak ASEAN didirikan pada tahun 1967, para anggota negara terus berusaha memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai kebijakan dan mekanisme. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan, meningkatkan investasi, serta memperluas hubungan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN juga memperkuat kerja sama antar negara dengan mengembangkan pembayaran digital lintas batas, meningkatkan standar keamanan siber, serta menaikkan pemahaman

masyarakat tentang dunia digital. Implementasi beberapa proyek seperti ASEAN *Single Window*, kerja sama sistem pembayaran digital, serta penyelarasan pengelolaan data menunjukkan bahwa ASEAN terus berusaha agar ekonomi digital di kawasan bisa berkembang secara berkelanjutan dan saling terhubung (Febreani, 2022).

Kebutuhan meningkatkan kapasitas sumber daya juga dirasakan oleh semua negara ASEAN untuk menghadapi persaingan di tingkat global. Transformasi digital di kawasan memerlukan standar yang sama agar aliran data lintas batas, sistem pembayaran digital, dan perdagangan *online* bisa berjalan dengan lancar (Asari et al., 2023). Seluruh negara anggota menyadari bahwa meningkatkan pemahaman tentang digital, melindungi data pribadi, dan mempersiapkan industri agar bisa beradaptasi dengan otomatisasi serta proses digitalisasi rantai pasok sangat penting (Rostini et al., 2022). Simulasi ekonomi ASEAN yang terpercaya dalam perdagangan konvensional, merambah sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, transformasi teknologi, dan penguatan konektivitas digital kawasan.

Kerja sama ini semakin kuat karena dibentuknya Komunitas *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015. Tujuannya adalah menciptakan pasar dan pusat produksi yang sama, sehingga barang, jasa, investasi, modal, serta tenaga kerja yang berpengalaman dapat bergerak lebih bebas di kawasan tersebut (Darmastuti et al., 2025a). Asia Tenggara di dorong untuk mendapatkan bentuk kerjasama regional yang terintegrasi, perkembangan ekonomi digital yang pesat di kawasan Asia. Sejak tahun 2018 hingga 2019, ASEAN mulai membangun dasar-dasar integrasi ekonomi digital dengan berbagai kebijakan, seperti *ASEAN Digital*

Intergration Framework Action Plan (DIFAP) 2019–2025. Kerangka ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan akses digital antar negara anggota dan membentuk lingkungan ekonomi digital yang mendukung pertumbuhan (ASEAN Secretariat, 2021). Namun, pendekatan yang masih fokus pada sektor tertentu dan tidak memiliki kekuatan mengikat menunjukkan kelemahan dalam menghadapi tantangan perdagangan digital lintas batas yang semakin rumit.

Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki mekanisme pengambilan keputusan tertinggi melalui Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) atau *ASEAN Summit*. KTT ASEAN merupakan badan pembuat kebijakan tertinggi di ASEAN yang terdiri dari Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN yang diadakan dua kali setahun pada waktu yang akan ditentukan oleh Ketua KTT ASEAN setelah berkonsultasi dengan Negara Anggota ASEAN lainnya, dan akan diselenggarakan oleh Negara Anggota ASEAN yang memegang Kepresidenan ASEAN. KTT ini diselenggarakan untuk menetapkan arah kebijakan strategis, mengevaluasi implementasi kerja sama kawasan, serta merumuskan berbagai inisiatif baru yang sesuai dengan dinamika lingkungan regional dan global (Secretariat ASEAN, 2026). Dalam perkembangannya, KTT ASEAN tidak lagi hanya berfokus pada isu-isu keamanan dan stabilitas kawasan, tetapi juga semakin menitikberatkan pada penguatan integrasi ekonomi regional, khususnya di bidang ekonomi digital.

Perubahan lanskap ekonomi global akibat revolusi industri 4.0 serta pesatnya perkembangan teknologi digital mendorong para pemimpin ASEAN menjadikan transformasi digital sebagai salah satu agenda prioritas kawasan.

Perkembangan ini juga semakin dipercepat setelah munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada 2020 yang mendorong percepatan adopsi layanan digital seperti belanja *online*, layanan keuangan digital, *telemedicine*, pendidikan jarak jauh, dan kerja jarak jauh, sehingga kegiatan ekonomi yang berbasis *platform* digital tumbuh jauh lebih cepat dibanding sektor tradisional (Sari et al., 2025). Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai hasil KTT ASEAN yang secara konsisten menegaskan pentingnya membangun konektivitas digital, memperkuat tata kelola data, meningkatkan keamanan siber, memperluas perdagangan digital, serta menciptakan ekosistem digital yang inklusif bagi seluruh negara anggota.

Peran KTT ASEAN menjadi semakin signifikan ketika Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 dengan mengusung tema "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*." Dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo dan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan negosiasi *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) sebagai langkah strategis untuk membangun pasar digital regional yang lebih terintegrasi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam *ASEAN Leaders' Joint Statement on the Development of the Digital Economy Framework Agreement* yang menjadi landasan politik dimulainya proses negosiasi DEFA (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Melalui keputusan tersebut, ASEAN menegaskan komitmen bersama untuk mengharmonisasikan regulasi digital, memfasilitasi perdagangan digital lintas batas, memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran dan data, meningkatkan

keamanan siber, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia digital sebagai fondasi utama integrasi ekonomi digital kawasan.

Komitmen ASEAN untuk membentuk kerangka kerja yang lebih terintegrasi kemudian diformalkan pada tahun 2021 melalui pengesahan *Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR)*. *Roadmap* ini secara eksplisit menempatkan ASEAN DEFA sebagai instrumen strategis untuk memperdalam integrasi ekonomi digital kawasan melalui suatu perjanjian regional yang lebih komprehensif dan mengikat. DEFA diposisikan sebagai solusi atas fragmentasi kebijakan digital ASEAN, sekaligus sebagai upaya meningkatkan daya saing kawasan dalam ekonomi digital global. Melalui inisiatif tersebut, ASEAN menempatkan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional sekaligus strategi adaptasi terhadap kompetisi global di era digital (Azzahra & Abdillahh, 2025).

Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan inisiatif regional yang dikembangkan oleh *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* untuk mempercepat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di kawasan. DEFA berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan standar dan praktik bersama yang mendorong integrasi ekonomi digital serta meningkatkan interoperabilitas antarnegara anggota. Kerangka kerja komprehensif ini juga bertujuan untuk menciptakan pasar digital yang lebih terpadu, mendorong transaksi lintas batas yang lebih lancar, serta membangun lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya di Kawasan ASEAN (B. T. F. Lee et al., 2025). Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama dalam

keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses ke pasar regional dan global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025).

DEFA mencakup sembilan ruang lingkup utama, yaitu pembayaran digital dan faktor elektronik, mobilitas dan kerja sama talenta, kerja sama pada topik-topik baru, kebijakan persaingan usaha, perdagangan elektronik lintas batas, perdagangan digital, identitas digital dan autentikasi, aliran data lintas batas dan perlindungan data, serta keamanan siber (ASEAN Secretariat, 2021). Kesembilan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa DEFA tidak hanya mengatur perdagangan digital, tetapi juga mengatur tata kelola ekonomi digital secara menyeluruh melalui harmonisasi kebijakan, peningkatan interoperabilitas sistem digital, serta penguatan kapasitas negara anggota ASEAN.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, pembentukan DEFA menunjukkan semakin kuatnya kecenderungan negara-negara ASEAN untuk membangun kerja sama regional sebagai respons terhadap globalisasi digital. Globalisasi digital merupakan proses perubahan besar dalam ekonomi dunia di mana teknologi digital, data, dan internet menjadi faktor utama yang mendorong berbagai kegiatan ekonomi di tingkat internasional. Robert O. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi internasional mampu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan transparansi, serta menciptakan keuntungan bersama melalui pembentukan aturan dan mekanisme kerja sama (Keohane, 1984). Dengan demikian, DEFA dapat dipahami sebagai institusi regional yang berfungsi mengurangi fragmentasi regulasi digital di ASEAN sehingga aktivitas perdagangan

digital, investasi teknologi, serta inovasi lintas negara dapat berkembang secara lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan teori liberalisme yang memandang bahwa kerja sama antarnegara dapat menghasilkan keuntungan kolektif melalui pembentukan institusi internasional yang mampu mengatur kepentingan bersama.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan signifikan mengenai ekonomi digital dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, perkembangan *e-commerce* yang pesat, serta kontribusi ekonomi digital yang semakin besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Christiono, 2024). Posisi tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar digital ASEAN, meningkatkan investasi di sektor teknologi, memperkuat ekspor jasa digital, serta meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui integrasi pasar digital regional.

Bagi Indonesia, pembentukan DEFA memiliki arti yang sangat strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh integrasi ekonomi kawasan, khususnya melalui kerja sama digital ASEAN yang terus berkembang. Upaya ASEAN untuk membentuk ASEAN DEFA menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, memperkuat perdagangan digital lintas batas, dan mengoptimalkan inovasi teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru. Bagi Indonesia, agenda ini membuka peluang besar untuk memperluas pasar digital nasional, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam penyesuaian regulasi domestik agar selaras dengan standar regional (Tech For Good Institute, 2023). Harmonisasi regulasi digital di kawasan akan membuka akses pasar yang lebih luas

bagi pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM digital, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan negosiasi DEFA sebagai salah satu prioritas kerja sama ekonomi kawasan (ASEAN Secretariat, 2023). Indonesia sebagai Ketua ASEAN mendorong percepatan pembahasan DEFA dan menghasilkan *ASEAN Leaders' Joint Statement on the DEFA Negotiations* sebagai landasan resmi negosiasi. Kesepakatan ini menekankan harmonisasi standar digital, fasilitasi perdagangan digital, interoperabilitas data, keamanan siber, serta peningkatan kapasitas SDM digital di kawasan (ASEAN Secretariat, 2023).

Namun demikian, implementasi DEFA menuntut adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar regional, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan domestik seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia digital, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, perbedaan tingkat kesiapan digital antarnegara ASEAN menyebabkan proses harmonisasi kebijakan tidak mudah dilakukan karena masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda, terutama mengenai pengelolaan data lintas batas dan perlindungan kepentingan ekonomi domestik (Haryo Limanseto, 2025).

Implementasi DEFA menuntut adanya harmonisasi kebijakan digital di antara negara-negara anggota ASEAN agar integrasi ekonomi digital dapat berjalan

efektif. Ini bertujuan menyatukan standar, regulasi, dan praktik terbaik dalam berbagai aspek seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, interoperabilitas sistem, hingga fasilitasi perdagangan digital. Negara-negara anggota ASEAN berupaya menyelaraskan aturan terkait aliran data lintas batas (*cross-border data flow*), standar keamanan informasi, serta regulasi *platform* digital agar tercipta ekosistem yang kompatibel dan kompetitif di kawasan. Upaya ini juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan regulasi antarnegara yang selama ini menjadi hambatan utama dalam integrasi ekonomi digital kawasan (ASEAN Secretariat, 2025).

Integrasi ekonomi digital regional juga dibutuhkan untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indo-Pasifik. Kerja sama digital memungkinkan negara anggota melakukan standarisasi aturan, meningkatkan interoperabilitas sistem, dan memperluas pasar digital lintas negara. Hal ini tidak hanya memudahkan pelaku UMKM memasuki pasar regional, tetapi juga mendorong inovasi, investasi teknologi, dan peningkatan kepercayaan antarnegara dalam pengelolaan data serta keamanan siber. Tanpa integrasi yang terstruktur, kesenjangan digital antarnegara dapat melebar dan mengurangi efektivitas transformasi ekonomi kawasan (OECD, 2021). Dengan demikian, DEFA diharapkan menjadi pilar utama integrasi digital ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan dalam rantai nilai ekonomi digital global (Zahrah & Darmastuti, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Kerja Sama Ekonomi Digital ASEAN melalui *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA): Peluang

dan Tantangan bagi Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan Indonesia dalam proses pembentukan DEFA dapat memberikan peluang strategis bagi peningkatan daya saing ekonomi digital nasional, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia, terutama berkaitan dengan harmonisasi regulasi, keamanan siber, perlindungan data pribadi, kesiapan infrastruktur digital, serta upaya mempertahankan kedaulatan digital nasional dalam kerangka integrasi ekonomi digital ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana peluang strategis dan tantangan yang diperoleh Indonesia melalui keterlibatannya dalam ASEAN DEFA?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan Indonesia melalui kerja sama ekonomi digital ASEAN, termasuk potensi peningkatan daya saing, ekspansi pasar digital, serta penguatan ekosistem inovasi nasional.
2. Menganalisis tantangan utama yang berpotensi menghambat kesiapan Indonesia, seperti perbedaan regulasi digital antarnegara ASEAN, isu keamanan dan arus data lintas batas, serta ketimpangan infrastruktur dan literasi digital domestik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian akademik terkait kerja sama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, khususnya mengenai peran ASEAN DEFA. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis konseptual mengenai integrasi kebijakan digital, arus data lintas batas, serta harmonisasi regulasi ekonomi digital di kawasan, yang dapat memperkaya literatur hubungan internasional, studi kebijakan publik, dan ekonomi digital regional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam proses perumusan posisi nasional (*national position*) dan strategi negosiasi Indonesia dalam DEFA, termasuk dalam penyelarasan regulasi domestik dengan standar regional.
2. Bagi Pelaku Usaha dan UMKM, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peluang pasar digital ASEAN, potensi ekspansi usaha, serta risiko yang perlu diantisipasi terkait standar teknis, keamanan siber, dan perdagangan elektronik.
3. Bagi Masyarakat dan Konsumen Digital, penelitian ini dapat membantu memahami dampak DEFA terhadap perlindungan data pribadi, keamanan digital, serta kualitas layanan digital lintas negara.
4. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian lanjutan mengenai transformasi digital di kawasan ASEAN dan implikasinya bagi negara berkembang seperti Indonesia.